

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU	14
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Bappeda untuk tahun Anggaran 2014.....	14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	20
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah.....	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	21
3.3. Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Bappeda yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Bappeda mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

Penyusunan Renja Bappeda yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Bappeda;
2. Tahap Penyajian rancangan Renja Bappeda.

Dalam Penyusunan Renja Bappeda Kab. Donggala, Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Bappeda, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Selanjutnya di laksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan untuk menggali Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja

Bappeda dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja Bappeda Kabupaten Donggala disusun dengan :

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPD
- b. Mengacu pada Rentra Bappeda
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

1.6. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Bappeda yang selanjutnya akan dipergunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) yang dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008.

1.6.1. Kewenangan (Mandat)

Melalui Peraturan Bupati Donggala Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
3. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program secara terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, antar pemerintah antar daerah antar sektor dan antar lintas lainnya;
5. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
6. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa;
7. Pelaksanaan SPM Daerah;
8. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Daerah dan antar Daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
9. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
11. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Daerah;
12. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala Daerah;
13. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;

14. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
15. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Daerah;
16. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah;
17. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Daerah;
18. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan , pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;
19. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
20. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antar daerah dengan swasta dalam dan luar negeri skala Daerah;
21. Bimbingan supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
22. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
23. Bimbingan Supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di kecamatan/desa;
24. Konsultasi pelayanan perkotaan skala Daerah;
25. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa;
26. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Daerah;
27. Bimbingan supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan di kecamatan/desa;
28. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
29. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa
30. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;

31. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
32. Pelaksanaan pengaturan dan pembinaan di bidang penataan ruang yang mencakup rencana umum tata ruang wilayah, rencana bagian wilayah dan rencanan kawasan tertentu;
33. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai;
34. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsiruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataaan ruang;
35. Penetapan kawasan strategis Daerah;
36. Sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang penataan ruang;
37. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang;
38. Pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang;
39. Penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
40. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Daerah;
41. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
42. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Daerah;
43. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah;
44. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRW Daerah;
45. Penyusunan program dan anggaran Daerah di bidang penataan ruang;
46. Perumusan kebijakan strategis operasional RTRW Daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah;
47. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah kawasan strategis Daerah;
48. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Daerah;
49. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah :

1. a) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah skala Daerah;
- b) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa;
- c) Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;
2. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Daerah;
3. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan;
4. Kawasan dan lingkungan perkotaan skala Daerah;
5. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Daerah;
6. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Daerah;
7. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Daerah;
50. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan penelitian, data, informasi dan statistik untuk keperluan perencanaan dan pembangunan Daerah;
51. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Daerah;
52. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Daerah;
53. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Daerah;
54. Pemberian dukungan survei berskala Nasional di tingkat Daerah di bidangekonomi dan kesejahteraan rakyat;
55. Pemberian dukungan surveisosial dan ekonomi;

56. Penyelenggaraan statistik sektoral skala Daerah;
57. Pengembangan jejaring statistik khusa skala Daerah;
58. Pelaksanaan kewenangan lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
59. Bappeda Kabupaten Donggala mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 2. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
 3. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
 4. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program secara terpadu antar satuan kerja perangkat daerah, antar pemerintahan, antar daerah, antar sektor dan antar lintas lainnya;
 5. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
 6. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan kecamatan/desa;
 7. Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah :
 - a. 1).Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanpembangunan daerah skala kabupaten; 2). Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan / desa; 3). Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
 - b. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;

- c. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan penelitian, data, informasi dan statistik untuk keperluan perencanaan dan pembangunan daerah;

1.2.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Untuk melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa struktur organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Bappeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyiapkan kebijakan Daerah dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Bappeda, menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Bappeda yang menjadi tanggungjawabnya, serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

- b. Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Sub Bagian Keuangan dan Aset
- Sub Bagian Perencanaan Program

- c. Bidang Litbang, Data, Evaluasi dan Pengendalian terdiri dari :

- Sub Bidang Litbang dan Data
- Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

- d. Bidang Ekonomi terdiri dari :

- Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I
- Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II

- e. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :

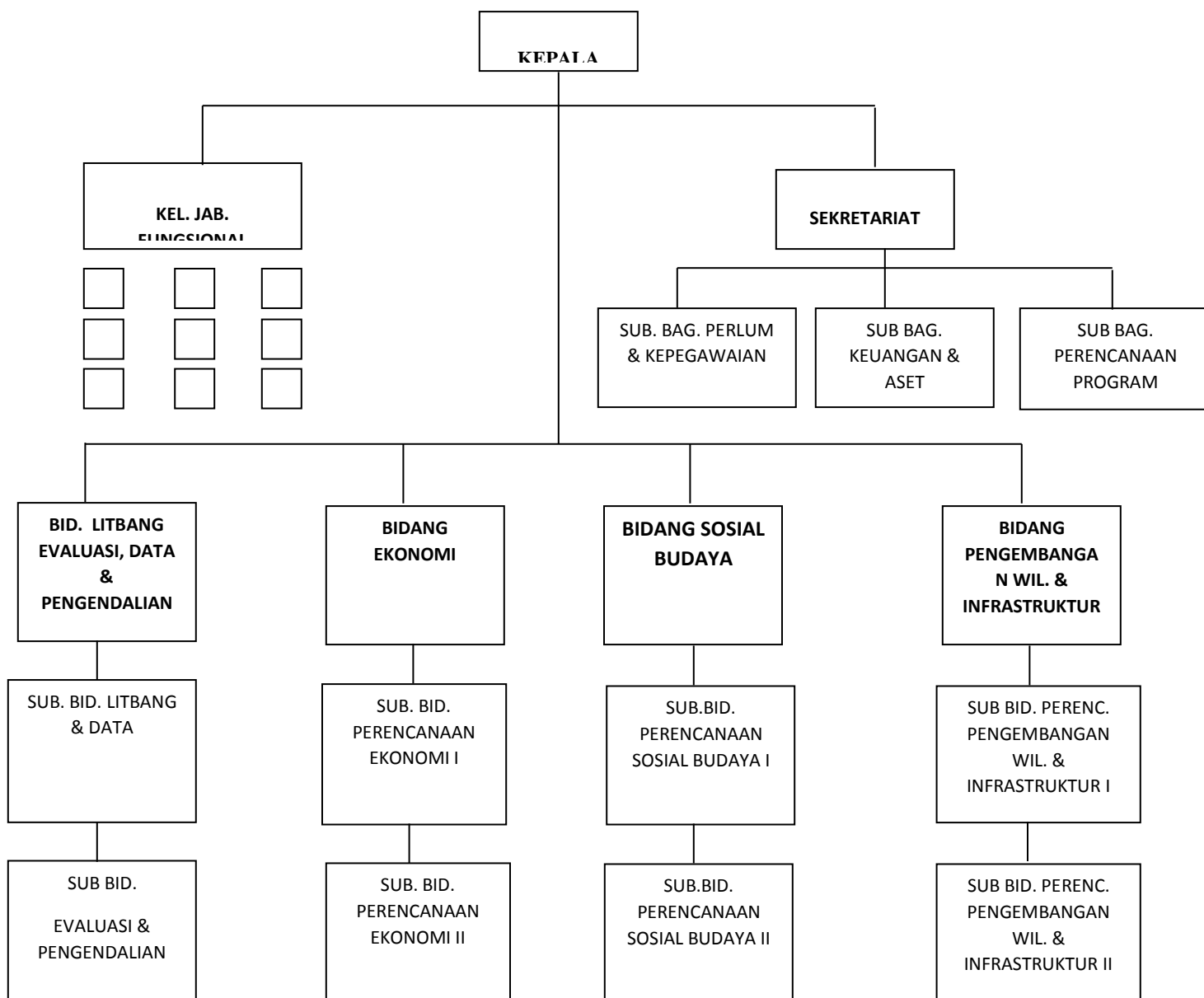
- Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I

- Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II
- f. Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur terdiri dari :
- Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur I
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur II

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN DONGGALA



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Donggala telah berupaya secara maksimal agar program yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategi (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

1.7. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk mensinkronkan usulan hasil Musrenbang kecamatan yang berisi program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2014 yang akan dijadikan acuan dalam Penyusunan akhir RKPD untuk dibahas dalam Musrenbang Tingkat Kabupaten yang selanjutnya akan ditetapkan untuk menjadi RAPBD.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk menjadi acuan dalam Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang dari Desa dan Kecamatan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja BAPPEDA

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Donggala telah berupaya secara maksimal agar program yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPD setiap Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Bappeda untuk tahun Anggaran 2013 dapat dijabarkan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Sisa Dana	Capaian (%)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.194.157.550	1.180.969.506	13.188.044	98,90%
2	Pengendaraan Kendaraan Dinas/Operasional	200.000.000	197.200.000	2.800.000	99%
3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	417.200.000	417.200.000	0	100%
4	Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2014-2018	170.000.000	167.759.550	2.240.450	99%
5	Evaluasi RPJMD Tahun 2009-2013	190.000.000	189.970.00	30.000	99%
6	Koordinasi Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	248.250.000	244.930.500	3.319.500	99%

7	Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP)	100.000.000	96.645.150	3.354.850	97%
8	Penyusunan Renja RKPD, KUA, PPAS PPA Tahun 2012 dan KUA-P dan PPAS-P Tahun 2012	251.745.000	250.490.000	1.255.000	99%
9	Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	540.713.500	462.648.932	78.064.568	86%
10	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah/Bappeda	249.286.500	243.457.450	5.829.050	98,09%
11	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan	270.000.000	265.251.800	4.748.200	98%
12	Penyusunan Statistik Dasar Kab. Donggala	387.550.000	374.674.800	12.875.200	97%
13	Koordinasi Penyusun SIPD	83.700.000	83.700.000	0	100%
14	Fasilitasi dan koordinasi Program Berbantuan Pembangunan ekonomi Daerah	125.000.000	112.902.000	12.098.000	90,32%
15	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	125.000.000	112.902.000	12.098.000	90,32%
16	Fasilitasi IBW dan Pembinaan Program Pengembangan Wilayah Perdesaan	330.000.000	322.799.000	7.201.000	97,82%
17	Pembinaan perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP)	125.000.000	121.152.100	3.847.900	96,92%

18	Koordinasi Program Penyediaan Air Minum & Penyehatan Lingkungan (AMPL)	237.680.000	236.178.400	1.501.600	99,37%
19	Koordinasi Program pengembangan Perumahan dan Pemukiman	82.680.000	82.676.000	4.000	99,99%
20	Koordinasi Program Sumber Daya Air	281.310.000	243.712.200	37.597.800	86,63%
21	Koordinasi Program penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat	150.000.000	142.798.210	7.201.790	95,19%
22	Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup	104.640.000	104.340.000	300.000	99,71%
23	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	144.390.000	135.299.000	9.091.000	93,70%
24	Fasilitasi Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	90.210.000	88.795.200	1.414.800	98,43%
25	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Donggala	282.550.000	278.115.000	4.435.000	98,43%
26	Koordinasi Perencanaan dan Promosi Potensi Daerah	246.403.100	229.356.000	17.047.100	93,08%
27	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	15.964.000	13.144.000	2.820.000	82,34%
28	Koordinasi dan Inventarisasi penanaman Modal dan Kerjasama Pembangunan	181.382.900	175.788.000	5.594.900	96,92%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda

Sebagai Instansi teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Donggala yang mendapat mandat (wewenang) dalam merumuskan berbagai kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan mempunyai peran yang sangat strategis terutama dalam hal :

- a. Menyiapkan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu untuk kebutuhan perencanaan
- b. Membina, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas.
- c. Mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penelitian terhadap masalah-masalah strategis yang berkembang dalam masyarakat sebagai dasar dan rujukan dalam pengambilan keputusan.

2.3. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Donggala Nomor 22 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala bertanggungjawab menyusun perencanaan di bidang pembangunan daerah serta kewenangannya harus dilaksanakan secara optimal.

Keberhasilan Bappeda Kabupaten Donggala dalam meningkatkan peranannya dapat menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Namun kenyataan menunjukkan bahwa Bappeda sebagai Institusi/Lembaga Perencana Fungsional belum sepenuhnya dapat memainkan peranannya dalam arti melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangannya secara optimal.

Berkaitan dengan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Ketersediaan Data dan Informasi untuk perencanaan Pembangunan relative masih perlu ditingkatkan dan di maksimalkan.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Perencana relative masih terbatas dari sisi mentalitas, wawasan maupun pendidikan.
4. Kurang optimalnya sistem pembinaan karier.
5. Rendahnya tingkat kesejahteraan PNS.

6. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Belum optimalnya Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi.
8. Sarana dan prasarana dukungan perencanaan masih sangat diperlukan atau masih terbatas
9. Pola atau strategi manajemen pengelolaan tugas dan fungsi masih perlu dimaksimalkan
10. Disiplin pengelolaan tugas dan fungsi relative masih perlu ditingkatkan

Sejalan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka ada beberapa isu strategis yang perlu di jadikan pertimbangan antara lain :

- Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan SDM Aparatur Perencana baik yang ada di SKPD Bappeda maupun pada SKPD pelaksanaan program melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendukung dalam proses perencanaan
- Peningkatan Sistem pengelolaan serta mekanisme proses perencanaan pembangunan yang mengarah pada proses perencanaan Partisipatif, dari bawah keatas dan keseimbangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda. Program kegiatan yang dimaksudkan dalam Rancangan Awal RKPD seluruhnya terakomodir dalam Renja Bappeda Tahun Anggaran 2015.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Urusan perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Donggala Tahun 2014-2019 khususnya pada prioritas lima yang menjadi bagian dari sasaran: Terwujudnya sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan yang akuntabel dan transparan.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut maka Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal menyusun rumusan tentang cita-cita atau harapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan serta cara mencapai cita-cita dan harapan tersebut baik dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Agar perencanaan pembangunan lebih sistematis, terarah dan terukur maka penyusunannya didasarkan pada data dan informasi serta sumberdaya yang tersedia. Karena itulah perencanaan pembangunan daerah memegang peranan yang vital di dalam memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu untuk menjamin konsistensi perencanaan antara perencanaan *top down and bottom up* maka setiap tahapan perencanaan senantiasa melibatkan pelaku-pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui mekanisme forum musyawarah perencanaan pembangunan. Forum musyawarah ini dimaksudkan disamping untuk memadu / serasikan perencanaan bawah-atas maupun atas-bawah juga sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah di dalam menyusun perencanaan pembangunan sehingga memudahkan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat khususnya *stakeholder* yang terlibat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

- **Tujuan:**
 1. Meningkatnya kualitas produk perencanaan;
 2. Meningkatnya kualitas mekanisme perencanaan pembangunan;
 3. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana perencanaan pembangunan.
- **Sasaran:**
 1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan;
 2. Terarahnya dan berkualitasnya pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 3. Berfungsinya proses mekanisme perencanaan secara berjenjang, terakurat dan dapat di implementasikan.

3.3. Program dan Kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sbb :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, meliputi kegiatan:
 - Rapat-Rapat dan Konsultasi
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pengelolaan Aset
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran**, meliputi kegiatan :
 - Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran
3. **Program Perencanaan Tata Ruang**, meliputi kegiatan:
 - Perencanaan Koordinasi Tata Ruang
4. **Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah**, meliputi kegiatan :
 - Koordinasi Penyusunan SIPD
 - Penyusunan Statistik Dasar Kabupaten Donggala
5. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, meliputi kegiatan :
 - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
 - Monitoring, evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Kabupaten Donggala;

- Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah/Bappeda dan Tapkin Kabupaten
 - Koordinasi Perencanaan Umum Pembangunan Daerah;
 - Penyusunan Renja Tahun 2015, RKPD Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015, KUA, PPAS Tahun 2015, KUA dan PPAS Perubahan 2014;
- 6. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**, meliputi kegiatan:
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
 - Fasilitasi dan Koordinasi Program Berbantuan Pembangunan Ekonomi Daerah;
 - Fasilitasi IBW dan Pembinaan PPWP.
- 7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**, meliputi kegiatan:
- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid Sosial dan Budaya;
 - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - Penyusunan Database Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud;
- 8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam**, meliputi kegiatan:
- Koordinasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
 - Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (WISMP);
 - Koordinasi Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman;
 - Koordinasi Program Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - Koordinasi Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLSDABM);
 - Koordinasi Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA);
 - Dukungan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perumahan di Daerah (PPSP);
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah Wilayah dan Infrastruktur.
- 9. Program Perencanaan Tata Ruang**

- Perencanaan dan Koordinasi Tata Ruang
10. **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**, meliputi kegiatan:
- Promosi potensi Daerah.
 - Penyusunan Profil Kabupaten Donggala.
11. **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**, meliputi kegiatan:
- Kajian Kebijakan Penanaman Modal
12. **Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah**, meliputi kegiatan:
- Kajian Potensi SumberDaya yang terkait dengan Investasi
13. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, meliputi kegiatan:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4
14. **Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah**
- Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
 - Penyusunan Statistik Dasar Kabupaten Donggala;
 - Penyusunan SIPD Kab.Donggala.
15. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, meliputi kegiatan:
- Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2014

dan Prakiraan Maju Tahun 2015

Kabupaten Donggala

No	Urusan / Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program : Perencanaan Tata Ruang	Persentase pemanfaatan dokumen koordinasi tata ruang oleh SKPD	100%	100%	100,000,000		100%	100,000,000
	Kegiatan : - Perencanaan dan Koordinasi Tata Ruang	Jumlah SKPD yang dikoordinir dalam BKPRD	15 SKPD	15 SKPD	100,000,000		15 SKPD	100,000,000
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				10,828,176,175			11,011,424,297
	Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase SKPD mitra Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur yang mempunyai dokumen perencanaan tahunan sesuai standar		100%	800,000,000		100%	600,000,000
	Kegiatan : - Koordinasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam Program Pamsimas	Kab. Donggala	7 SKPD	150,000,000		7 SKPD	100,000,000

No	Urusan / Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan : - Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (Hibah WISMP-2) Kabupaten Donggala	Jumlah SKPD yang dibina dalam Perkuatan kelembagaan sumber Daya air	Kab. Donggala	7 SKPD	200,000,000		7 SKPD	100,000,000
	Kegiatan : - Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (Pendamping WISMP-2) Kabupaten Donggala	Jumlah SKPD yang dibina dalam Perkuatan kelembagaan sumber Daya air	Kab. Donggala	7 SKPD	100,000,000		7 SKPD	100,000,000
	Kegiatan : - Koordinasi Program Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya air berbasis Masyarakat (PLSDAM)	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam Program PLSDAM	Kab. Donggala	7 SKPD	120,000,000		7 SKPD	100,000,000
	Kegiatan : - Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	Kab. Donggala	5 SKPD	120,000,000		5 SKPD	100,000,000
	Kegiatan : - Dukungan program percepatan pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah SKPD yang didukung dalam Program PPSP	Kab. Donggala	7 SKPD	110,000,000		7 SKPD	100,000,000
	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase lancarnya administrasi perkantoran		100%	2,100,000,000		100%	2,100,000,000
	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah pelaksanaan rapat	Kab. Donggala	12 bulan	600,000,000		12 bulan	600,000,000

No	Urusan / Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan : Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi	Kab. Donggala	12 bulan	1,500,000,000		12 bulan	1,500,000,000
	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Kualitas sarana dan prasarana efektif dan efisien		100%	750,000,000		100%	250,000,000
	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	Presentase sarana dan prasarana kantor yang dimanfaatkan	Kab. Donggala	100%	750,000,000		100%	250,000,000
	Program : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Persentase PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional		100%	600,000,000		100%	600,000,000
	Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional		10 Org	300,000,000		10 Org	300,000,000
	Kegiatan : Bimtek tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah PNS seluruh SKPD yang mengikuti Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah		49 Orang	300,000,000		49 Orang	300,000,000
	Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemanfaatan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100,000,000		100%	100,000,000

No	Urusan / Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan : Penyusunan pelaporan keuangan dan aset akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan akhir tahun yang berkualitas sesuai standar teknis	Kab. Donggala	1 Dok	100,000,000		1 Dok	100,000,000
	Program : Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Persentase SKPD mitra Bidang Sosial Budaya yang mempunyai dokumen perencanaan tahunan sesuai standar		100%	3,028,176,175		100%	3,911,424,297
	Kegiatan : Koordinasi Pengembangan Pariwisata Kota Donggala	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam kegiatan pengembangan pariwisata kota donggala	Kab. Donggala	10 SKPD	1,700,000,000		10 SKPD	2,500,000,000
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Kab. Donggala	26 SKPD	228,176,175		26 SKPD	228,176,175
	Kegiatan : Penyusunan data base perencanaan pembangunan Bidang Sosbud	Jumlah Dokumen Data Base perencanaan bidang Sosbud yang berkualitas sesuai standar teknis.	Kab. Donggala	1 Dok	100,000,000		1 Dok	100,000,000
	Kegiatan : Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam kegiatan pengembangan pariwisata kota donggala	Kab. Donggala	15 SKPD	200,000,000		15 SKPD	283,248,122
	Kegiatan : Koordinasi Program terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah kampung (PTPK-BBK) Kabupaten	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung (PTPK-	Kab. Donggala	15 SKPD	800,000,000		15 SKPD	800,000,000

No	Urusan / Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Donggala	BBK)						
	Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh SKPD			2,550,000,000			2,550,000,000
	Kegiatan : Penyusunan RENJA, RKPD, Perubahan RKPD, KUA, PPAS, PPA Tahun 2013 dan KUA-P, PPAS-P	Jumlah Dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas sesuai standar teknis.	Kab. Donggala	10 Dok	700,000,000		10 Dok	700,000,000
	Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Persentase hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	Kab. Donggala	100%	700,000,000		100%	700,000,000
	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	Jumlah SKPD yang dikoordinasikan dalam Perencanaan Umum Daerah	Kab. Donggala	49 SKPD	700,000,000		49 SKPD	700,000,000
	Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan	Persentase kesesuaian antara Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan	Kab. Donggala	100%	250,000,000		100%	250,000,000
	Kegiatan : Koordinasi Penyusunan LAKIP/Bappeda dan Tapkin	Jumlah Dokumen LAKIP Kabupaten/Bappeda dan TAPKIN	Kab. Donggala	3 Dok	200,000,000		3 Dok	200,000,000

No	Urusan / Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program : Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase SKPD mitra Bidang Ekonomi yang mempunyai dokumen perencanaan tahunan sesuai standar		100%	900,000,000		100%	900,000,000
	Kegiatan : - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah SKPD yang difasilitasi dan dikoordinasikan dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kab. Donggala	8 SKPD	250,000,000		8 SKPD	250,000,000
	Kegiatan : - Fasilitas dan Koordinasi Program Berbantuan Pembangunan Ekonomi daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dan dikoordinasikan dalam Program Berbantuan Pembangunan Ekonomi Daerah	Kab. Donggala	7 SKPD	400,000,000		7 SKPD	400,000,000
	Kegiatan : - Fasilitasi IBW dan Pembinaan Program Pengembangan Wilayah Perdesaan	Jumlah SKPD yang difasilitasi dan dibina dalam IBW	Kab. Donggala	6 SKPD	250,000,000		6 SKPD	250,000,000
	STATISTIK				1,500,000,000			1,500,000,000
	Program : Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang ditindaklanjuti oleh SKPD		80%	1,500,000,000			1,500,000,000

No	Urusan / Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Rencana Tahun 2015	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan : Penyusunan Statistik Dasar Kabupaten Donggala	Jumlah Dokumen statistik yang berkualitas sesuai standar teknis	Kab. Donggala	8 Dok	400,000,000			400,000,000
	Kegiatan : Koordinasi Penyusunan SIPD	Jumlah Dokumen SIPD yang berkualitas sesuai standar teknis	Kab. Donggala	1 Dok	100,000,000			100,000,000
	Kegiatan : Penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Penelitian yang berkualitas sesuai standar teknis	Kab. Donggala	1 Dok	1,000,000,000			1,000,000,000

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Donggala telah melaksanakan tugasnya dan berupaya secara maksimal dimana Program/Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap Tahun Anggaran dapat terlaksana dengan baik.

Namun dibalik keberhasilan terdapat hambatan dan tantangan dalam mewujudkan keberhasilan-keberhasilan tersebut yaitu masih belum optimalnya pemberdayaan dan pendayagunaan aparat, khususnya dalam hal pembinaan dan pemberian sanksi-sanksi sehingga masih terdapat sebagian aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal yang belum dapat menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya secara disiplin.

Oleh karena itu diharapkan kedepan agar dapat tercapai hasil yang optimal maka diperlukan aparat yang mampu dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.